

# DARIUS BEDA DATON: DUKCAPIL KUPANG PERLU PERBAIKAN MANAJEMEN PELAYANAN

Senin, 15 April 2019 - Victor William Benu

RADARNTT, Kupang - Proses pencetakan E-KTP yang disebut-sebut terkesan lamban, dicetak dobel dan diskriminatif disinyalir dimanfaatkan oknum anggota DPRD maupun caleg sebagai calo dalam momentum politik seperti saat ini, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Agus Ririmasse selaku Plt. Dukcapil Kota Kupang untuk mendapat pengakuan dan kepuasan publik.

"Sebelumnya, Saya sudah sidak berkali-kali di bawah (Dukcapil), saya juga sudah sampaikan saran secara tertulis, pelayanan KTP tidak boleh lewat anggota DPR. Sebenarnya tidak boleh, sebab pelayanan tidak boleh diskriminatif. Siapa pun dia entah pejabat atau bukan, siapa yang datang lebih dahulu mesti dilayani lebih dahulu," demikian pernyataan Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT di ruang kerjanya, Jalan Veteran No.4A, Kelapa Lima.

Perlakuan diskriminatif itu salah dan tidak boleh. Yang perlu diatur oleh mereka adalah manajemen distribusi E-KTP.

Lebih lanjut terkait lambannya kinerja Dukcapil, Darius Beda Daton kembali mengomentari melalui pesan WhatsApp kepada RADARNTT (Jumat, 13/04/2019).

Tadi pagi 07.30 saya kunjungi loket Dukcapil dan berbincang dengan warga tanpa memberitahu Pak Kadis. Beberapa warga yang sudah merekam sejak Januari dan Februari. Namun, hingga April belum dicetak.

Saya sudah melakukan koordinasi dengan Pak Agus tetapi berhubung sebagian pegawai Dukcapil sedang berada di kantor Walikota untuk mendistribusikan E-KTP sehingga pelayanan di kantor Dukcapil sedikit terganggu, tulisnya.

Menurut Darius, Plt Dukcapil Agus Ririmasse merupakan orang yang sangat responsif dan telah membuat banyak perubahan pelayanan di dinas Dukcapil. Sejauh ini saya tidak melihat pelayanan diskriminatif. Saya juga memberikan banyak masukan untuk perbaikan pelayanan. Kita harus mendukung agar beliau semangat bekerja dan memperbaiki pelayanan yang carut-marut sebelumnya.

Ia berharap Dukcapil dapat melayani dengan manajemen pelayanan yang benar dan tidak mendahulukan orang yang datang kemudian serta tidak diskriminatif sehingga semua masyarakat merasakan perlakuan yang sama dan adil. (VINSEN/SET/RN)